



Evaluasi Kinerja Realisasi Anggaran Kecamatan Singkawang Tengah Tahun 2025 Berdasarkan Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja

Penulis:

Nurul Amanda¹, Elvira Mulya Nalien²

Afiliasi:

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jakarta, Indonesia¹

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat, Indonesia²

Email:

34.0325@praja.ipdn.ac.id¹, elviramnalien@ipdn.ac.id²



©2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

DOI : <https://doi.org/10.33701/jtpm.v5i2.5372>

*Penulis Korespondensi

Nama: Nurul Amanda

Afiliasi: IPDN Kampus Sumatera Barat

Email: 34.0325@ipdn.ac.id

Diterima: 27 Juni 2025

Direvisi: 19 November 2025

Publikasi Online: 28 November 2025

Abstract

The problem studied is about the failure to achieve budget realization in Singkawang Tengah District, with a minimum target of 25%, thus indicating that the performance budget is not yet optimal. This study aims to evaluate budget realization in Singkawang Tengah District, with a focus on the Performance-Based Budget approach. The researcher utilized the Qualitative Descriptive research method, using secondary data from the first quarter Budget Realization Report (LRA). The analysis technique takes into account the percentage of budget absorption (input), the results or outputs of activities, and the performance impact (outcome). Through observation of the LRA document for the first quarter of March 2025, it reached only 15.46% of the total budget, finding that the realization is still far below the target. Where the ideal quarter is 25%. Furthermore, important expenditure items such as the provision of Employee Income Supplements (TPP) have not been realized. The results of the study indicate that the researcher's assessment is that the budget in Singkawang Tengah District focuses more on input or budget obtained from the community, and does not consider in depth how the results and impacts ultimately form output and outcomes. As a form of accountability for the use of public funds, a budget planning and reporting system is needed that focuses more on output and the impact of results.

Keywords: : Budget Realization, Evaluation, Performance-Based Budget, Sub-district.

Abstrak

Permasalahan yang diteliti adalah tentang ketidaktercapaian realisasi anggaran Kecamatan Singkawang Tengah, dengan target minimal 25%, sehingga menjadi indikasi belum optimalnya anggaran kinerja. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi realisasi anggaran di Kecamatan Singkawang Tengah berfokus pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja. Peneliti memanfaatkan metode penelitian Deskriptif Kualitatif, menggunakan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) triwulan pertama. Teknik analisis dengan memperhatikan persentase penyerapan anggaran (input), hasil atau output kegiatan, dan dampak kinerja (outcome). Melalui pengamatan dokumen LRA triwulan pertama bulan Maret 2025 baru mencapai 15,46% dari total anggaran, menjadi temuan bahwa realisasi masih jauh dibawah target. Dimana untuk triwulanan ideal sebesar 25%. Lebih lanjut, pada pos-pos penting pengeluaran seperti pada pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum terealisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian

peneliti bahwa anggaran di Kecamatan Singkawang Tengah lebih banyak berfokus pada input atau anggaran yang diperoleh dari masyarakat, dan kurang mempertimbangkan secara mendalam bagaimana hasil dan dampak pada akhirnya berupa output dan outcome. Sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan dana publik, diperlukan suatu sistem perencanaan dan pelaporan anggaran yang lebih berfokus pada output dan dampak hasil.

Kata kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Evaluasi, Kecamatan, Realisasi Anggaran.

PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran publik sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan dan dukungan masyarakat. Di tengah tuntutan, akan ada transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi, anggaran bukan hanya alat untuk mengatasi masalah tetapi juga untuk mengevaluasi pekerjaan lembaga pemerintah. Di era desentralisasi, pemerintah negara memiliki keinginan dan komitmen yang kuat untuk menangani situasi dengan cara yang efisien, efektif, dan berfokus pada hasil. (Faldo Junayles Sianturi, Jonson Rajagukguk, 2025)

Sebagai bagian dari pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat luas, kecamatan memiliki peran penting dalam memberikan layanan publik yang berkualitas tinggi kepada warga negara (Maulida, 2021). Salah satu contohnya adalah Kecamatan Singkawang Tengah yang berfungsi sebagai pusat administrasi di tingkat kecamatan dan memiliki kewajiban layanan yang tinggi. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran di kecamatan ini. Penggunaan anggaran yang tidak efektif dapat menghambat program pembangunan dan menurunkan standar kualitas layanan kepada masyarakat umum.

Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance-Based Budgeting*/PBB) menciptakan akuntabilitas anggaran publik. Pendekatan ini membangun hubungan antara input (jumlah data yang dikumpulkan), output (jumlah kegiatan yang dilakukan), dan outcome (dampak kegiatan terhadap masyarakat umum) (Israr & Syofyan, 2022). Dengan demikian, keberhasilan penggunaan anggaran tidak hanya disebabkan oleh seberapa banyak anggaran yang direalisasikan, tetapi juga sebesar mana keuntungan dan manfaat signifikan yang direalisasikan. Untuk mendukung hal ini, penelitian ini juga menerapkan teori *Value for Money* (VfM) sebagai panduan, yang berfokus pada prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) dalam penggunaan data publik.

Namun demikian, keadaan terkini di Kecamatan Singkawang Tengah menunjukkan adanya konflik antara kondisi ideal dan aktual. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sampai dengan akhir Triwulan I Tahun Anggaran 2025, total belanja sebesar Rp11.058.626.480.00 dan realisasinya sebesar Rp1.710.173.084,00 atau sekitar 15,46%. Data realisasi tersebut masih di bawah standar minimal triwulan pertama yang idealnya mencapai sekitar 25% dari total anggaran tahun berjalan.

Tabel 1. Ringkasan Realisasi Anggaran Bulan Maret Kecamatan Singkawang Tengah

Nama Belanja	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	Persen(%)
Belanja Pegawai	6.917.035.759,00	1.238.289.802,00	17,90%
Belanja Barang dan Jasa	4.091.548.472,00	456.232.282,00	11,15%
Tambahan Penghasilan ASN	1.937.801.619,00	0,00	00,0%
Total Belanja	11.058.626.480,00	1.710.173.084,00	15,46%

Sumber: Data diolah dari Kecamatan Singkawang Tengah 2025

Analisis lebih lanjut berdasarkan jenis belanja menunjukkan bahwa belanja pegawai terbaru sebesar Rp1.238.289.802,00 dari anggaran Rp6.917.035.759,00 atau 17,90%. Sebaliknya realisasi penjualan barang dan jasa hanya mencapai Rp456.232.282,00 dari total penjualan sebesar Rp4.091.548.472,00 atau 11,15%. Pada beberapa komponen krusial seperti Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan sebesar Rp1.937.801.619,00, tetapi belum terealisasi sama sekali. Hal tersebut menunjukkan bahwa jenis belanja tersebut belum terlaksanakan. Secara umum, kondisi ini berdampak negatif terhadap motivasi dan semangat kerja ASN dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Penyusunan anggaran memperhatikan memiliki keterkaitan antara pembiayaan dan keluaran dan hasil, berdasarkan (Mardiasmo, 2018). Hal ini dikenal dengan Anggaran Berbasis Kinerja. Studi ini berfokus pada tiga elemen utama: input (sumber daya yang dialokasikan), output (produk atau layanan yang dihasilkan), dan outcome (kerusakan yang ditimbulkan).

Value for Money merupakan konsep manajemen organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E). Ekonomi berkaitan dengan input dalam jumlah dan kualitas tertentu ke dalam harga tanah. Efisiensi merupakan kemampuan untuk mencapai output maksimum dengan input minimum atau penggunaan input minimum untuk mencapai output maksimum. Efektivitas didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan program dalam kaitannya dengan target yang telah ditentukan (Reski, 2021).

Desentralisasi fiskal memberi pemerintah daerah kesempatan untuk mengelola uang dengan cara yang akan meningkatkan efisiensi dalam operasi sehari-hari dan respons terhadap kebutuhan lokal (Miar, 2024). Kecamatan sebagai unit terdepan mempunyai peran strategisnya dalam implementasi kebijakan dan pelayanan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nasional menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan nasional yang transparan, akuntabel, dan fokus pada hasil. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan suatu negara dikelola menurut peraturan perundangan, berdasarkan efisiensi, keekonomian, efektivitas, dan transparansi.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga No. 90 Tahun 2010 mengatur mengenai pelaksanaan anggaran berdasarkan kinerja pada tingkat kementerian/lembaga, termasuk kecamatan sebagai satuan kerja. Pasal 8 menyoroti pentingnya hubungan antara Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah diatur dalam

peraturan ini, termasuk mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran di tingkat kecamatan serta mengukur kinerja indikator rencana kerja.

Penulis membaca beberapa referensi yang berhubungan dengan evaluasi realisasi anggaran di berbagai daerah dan tingkatan organisasi pemerintahan daerah. Tulisan dari Jiman et al. (2025) mengintegrasikan anggaran berdasarkan kinerja, SPIP, dan akuntabilitas dapat membantu meningkatkan keadaan keuangan publik di Kabupaten Manggarai Timur. Menurut Nurul Aulia dkk. (2024), akuntabilitas dan pengawasan mendukung anggaran SKPD di Provinsi Gorontalo berdasarkan kinerja. Menurut Nuba et al. (2024), penyusunan anggaran berbasis kinerja di DPMPSTP Kabupaten Nagekeo masih menghadapi tantangan seperti keterlambatan anggaran dan keterbatasan anggaran, namun juga menerapkan indikator evaluasi kinerja secara komprehensif.

Muchtar et al. (2024) mengkaji bagaimana meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai penyusunan anggaran berdasarkan kinerja dan mekanisme pertanggungjawaban desa.

Krisnanda et al. (2024) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja, namun tidak menganalisis secara spesifik efektivitas realisasi anggaran. (Maumere, 2024) mengevaluasi anggaran belanja RSUD menggunakan kriteria efektivitas dan efisiensi, tetapi kurang efektif dalam satu institusi vertikal. (Layuk, 2023) meneliti situasi nyata di Kabupaten Toraja Utara dengan penekanan pada faktor-faktor ekonomi makro tanpa mempengaruhi opini publik. (Stieny, 2020) mengevaluasi dampaknya terhadap kemampuan desa untuk bekerja, tetapi mereka tidak mengintegrasikan analisis input-output-outcome secara sistematis.

Temuan utama penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: (1) fokus pada evaluasi anggaran tanpa mempertimbangkan hasil dan dampak kegiatan; (2) kurangnya analisis komprehensif yang mengintegrasikan input-output-outcome di tingkat kecamatan; (3) kurangnya pertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas realisasi anggaran di unit pelayanan terdepan; dan (4) tidak adanya model untuk mengevaluasi anggaran berbasis kinerja yang dapat diterapkan pada tingkat kecamatan sebagai tombak pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kondisi aktual APBD Singkawang Tengah, tidak hanya dari sisi dana tetapi juga dari sisi hasil kegiatan dan dampak kinerja. Oleh karena itu, penulis membuat artikel ilmiah dengan judul "*Evaluasi Kinerja Realisasi Anggaran Kecamatan Singkawang Tengah Tahun 2025 Berdasarkan Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas sebagai kajian evaluatif berbasis kinerja di tingkat kecamatan dan menyajikan model evaluasi anggaran berbasis kinerja yang dapat diterapkan di daerah lain.

METODE

Pendekatan deskriptif kualitatif pada penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengukur realisasi anggaran di Kecamatan Singkawang Tengah dengan menggunakan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas berdasarkan kerangka Anggaran Berbasis Kinerja (PBB). Penelitian ini penting karena dapat memberikan gambaran yang jelas secara konseptual tentang hubungan antara alokasi anggaran (input), pelaksanaan kegiatan (output), dan dampaknya terhadap masyarakat umum (outcome).

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen keuangan riil, dengan fokus utama pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Singkawang Tengah tahun 2025. Selain itu, review literatur ilmiah dan peraturan terkait, seperti Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, digunakan untuk memperkuat keterampilan analisis dan memastikan bahwa interpretasi data dilakukan secara relevan dan normatif.

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif dan evaluatif. Analisis data dilakukan dengan memperhatikan selisih antara realisasi dan target minimal triwulan 25%, serta dengan menghitung persentase realisasi anggaran terhadap alokasi yang sedang dibahas. Selanjutnya, hasilnya digunakan untuk mengevaluasi anggaran kinerja dengan menghitung input (anggaran yang digunakan), output (jumlah kegiatan yang dilakukan), dan outcome (nilai atau hasil yang diperoleh).

Melalui penelitian ini, peneliti tidak hanya menilai hasil dari sisi serapan, tetapi juga menentukan apakah dana yang digunakan telah menghasilkan capaian yang relevan dengan tujuan pembangunan kecamatan. Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan informasi objektif mengenai evaluasi realisasi anggaran pada triwulan pertama, tetapi juga dapat menjadi rekomendasi bagi para pemangku kepentingan dan pemerintah untuk perbaikan realisasi anggaran ke depannya, khususnya di Kecamatan Singkawang Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tiga komponen utama analisis Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) adalah persentase serapan anggaran (input), keluaran kegiatan (output), dan hasil kinerja (outcome). Tujuan analisis ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan keandalan penggunaan anggaran publik di Kecamatan Singkawang Tengah Tahun Anggaran 2025.

1. Persentase Serapan Anggaran (Input)

Persentase penyerapan anggaran segera setelah anggaran realisasi dianalisis dalam bentuk pengeluaran. Dalam konteks penelitian ini, pertumbuhan Kecamatan Singkawang Tengah sampai dengan triwulan I pada tahun 2025 sebesar 15,46% dari total alokasi anggaran tahunan.

Analisis Efisiensi dan Inefisiensi

Kondisi ini mengindikasikan adanya tanda-tanda ineffisiensi. Persentase penyerapan sebesar 15,46% menunjukkan tingkat ineffisiensi yang signifikan dalam pengelolaan anggaran. Angka ini berada di bawah ambang batas ideal triwulanan yaitu sekitar 25% yang menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam pelaksanaan kegiatan. Keterlambatan penyerapan anggaran ini berpotensi menghambat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan selain mengganggu kelancaran organisasi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi

Sejumlah faktor internal dan eksternal berkontribusi terhadap penurunan anggaran. Faktor internal meliputi lemahnya sistem perencanaan yang tidak mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan riil, keterbatasan kompetensi SDM dalam anggaran pengelolaan, dan sistem administrasi keuangan yang belum optimal. Faktor eksternal meliputi regulasi pengadaan yang kompleks, kondisi ekonomi makro yang tidak stabil, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan eksternal yang kurang efektif.

Analisi Tambahan

Penyebab rendahnya realisasi pada triwulan pertama bulan Maret 2025 adalah karena pembukaan anggaran di triwulan pertama yang mengakibatkan lonjakan pengeluaran di akhir tahun. Untuk mencapai anggaran penyerapan yang lebih proporsional dalam beberapa triwulan realisasi ke depan, perlu dilakukan redistribusi timeline pelaksanaan kegiatan dan perbaikan sistem perencanaan.

2. Keluaran Kegiatan (Output)

Output adalah hasil langsung dari suatu kegiatan atau program, seperti jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Dalam konteks Kecamatan Singkawang Tengah, outputnya meliputi layanan administrasi kependudukan, program pemberdayaan, dan pelaksanaan fungsi pemerintahan kecamatan.

Achievement Effectiveness vs. Target

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan perbedaan yang cukup besar dalam pencapaian antar program kerja. Jenis rutinitas, seperti prosedur kependudukan administratif, menunjukkan batas keluaran relatif konstan, sementara strategi khusus program terus menurun dalam hal mencapai target. Secara keseluruhan, kegiatan pendapatan ASN relatif kurang berhasil dalam mencapai tujuan mereka mengarah ke penurunan keluaran umum.

Qualitative Output

Selain parameter kuantitatif, kualitas keluaran merupakan persyaratan yang paling penting. Sementara beberapa kegiatan mencapai tujuan kuantitatif mereka, selalu ada bukti bahwa kualitas layanan tetap tidak mencapai standar. Hal itu disebabkan oleh kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat umum terhadap layanan publik.

Analisis Tambahan

Keterbatasan sumber daya manusia yang belum sesuai dengan tugas fungsi dan keahliannya, sistem pemantauan dari kecamatan yang belum real-time, dan kurangnya koordinasi antarunit kerja merupakan penyebab utama kinerja keluaran yang kurang optimal. Lingkungan kerja yang tidak mendukung juga berdampak pada produktivitas dalam menghasilkan output yang berkualitas.

3. Outcome Kinerja

Outcome yang telah ditetapkan memberikan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat umum atau lingkungan. Hasil kerja di Singkawang Tengah ditentukan oleh peningkatan indeks kepuasan penduduk, kecepatan kerja masyarakat, dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Analisis Dampak dan Akuntabilitas

Dampak program kegiatan pemerintah terhadap masyarakat cukup masif. Hasil kerja menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat umum

masih cukup rendah. Meskipun beberapa program telah dilaksanakan, dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat umum belum mencapai puncaknya. Hal ini menunjukkan bahwa fokus orientasi anggaran lebih pada tingkat penyelesaian kegiatan daripada pengukuran dampak.

Dari sisi tingkat akuntabilitas, hasil kerja sebagai tolok ukur akuntabilitas menunjukkan bahwa anggaran publik tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Terdapat kekurangan sistem pelaporan berbasis hasil yang dengan demikian menghasilkan pengembalian investasi yang negatif terhadap semua program yang dijalankan oleh pihak publik. Lebih lanjut, akuntabilitas lebih memperhatikan aspek kepatuhan prosedural daripada akuntabilitas hasil.

Analisis Tambahan

Kurangnya indikator kinerja SMART, sistem manajemen informasi kinerja yang tidak berfungsi sepenuhnya, serta sistem evaluasi yang lebih ketat berbasis hasil adalah penyebab utama dari hasil kerja yang kurang optimal. Dampak jangka panjang sering dikritik karena kurangnya data dasar yang komprehensif dan sistem pelacakan yang efektif.

4. Analisis Integrasi Tiga Elemen Anggaran Berbasis Kinerja

Analisis menunjukkan bahwa elemen ketiga ABK memiliki hubungan sistemik yang kuat. Anggaran yang rendah menyerap 15,46% berkorelasi dengan kinerja kegiatan. Sebaliknya, kinerja menurun berdampak pada hasil. Ketiga elemen dari penerapan ABK memastikan perbaikan yang diperlukan. Dari sudut pandang efisiensi, rendahnya anggaran menunjukkan inefisiensi dalam penggunaan daya sumber. Efektivitas dipertanyakan karena kurangnya koordinasi antara input, proses, dan output. Dari sudut pandang akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dalam penerapan ABK kurang divalidasi, karena elemen hasil program tidak terpenuhi dengan sendirinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang kami selesaikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) di Kecamatan Singkawang Tengah saat ini sebagian besar berada pada tahap transisi, berangkat dari pola penganggaran tradisional dan lebih fokus pada kinerja dan hasil. Tinjauan menyeluruh persentase penyerapan anggaran, output kegiatan, dan kinerja outcome jelas menunjukkan perlunya transformasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Rendahnya tingkat penyerapan anggaran ditambah dengan lemahnya kinerja outcome yang terlihat dan belum tampak signifikan capaian output kegiatan, merupakan indikasi jelas bahwa ABK belum dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan prosedur yang sistematis dan menyeluruh untuk menjamin keberhasilan seluruh tahapan anggaran pengelolaan. Hal ini mencakup perencanaan yang lebih menyeluruh, pelaksanaan yang efisien, pemantauan yang penuh perhatian, dan evaluasi berdasarkan hasil. Peningkatan dari ABK yaitu efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas terlihat jelas.

Untuk mencapai implementasi ABK yang optimal, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh bagian organisasi, termasuk pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemahiran dalam menangani tugas-tugas pekerjaan. Penyempurnaan sistem dan prosedur yang ada

harus terus dilakukan, dibarengi dengan budaya kerja yang selalu berorientasi pada peningkatan kinerja dan pencapaian hasil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan hormat dan terima kasih kepada dosen kami, Ibu Elvira Mulya Nalien, S.IP.,M.Si. selaku dosen pembimbing kami. Untuk semua ilmu, petunjuk, kritik, dan arahan guna terus memperbaiki tulisan ini. Harapan pada waktu dekat dari penulis agar artikel ilmiah ini bisa bermanfaat khususnya dapat menjadi referensi tulisan bernuansa keuangan publik yang membahas evaluasi realisasi anggaran dengan fokus pada evaluasi berbasis kinerja. Kemudian harapan pada jangka panjang, semoga penulis bisa terus memperkaya ilmu dan mampu menyebarkannya melalui tulisan selanjutnya yang lebih baik.

REFERENSI

- Faldo Junayles Sianturi, Jonson Rajagukguk, Maringan Panjaitan. (2025). *GOVERNANCE : Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*. 12(September), 131–143.
- Israr, Nadira Hilmi, & Syofyan, Efrizal. (2022). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* 1,2. 4(4), 686–697.
- Jiman, Wieke, Mariana Natalia Tri De, Kerih, Anthon Simon Y., & Dethan, Minarni A. (2025). *Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja, SPIP, dan Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur mengalami*. 5(April).
- Krisnanda, Kevin Pradana, & Anwar, Saiful. (2024). *Pengaruh Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya*. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(4), 2718–2735. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15759>
- Layuk, Intan Rante. (2023). *Analisis Cash Flow dan Laporan Realisasi Anggaran Sebagai Penunjang Evaluasi Kinerja Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Toraja Utara*. 2(2), 1–14. <https://doi.org/10.56326/access.v2i2.3063>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru*. Retrieved from <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:216814090>
- Maulida, Rizki. (2021). *Rizki Maulida - Peran Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Rizki Maulida - Peran Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai*.
- Maumere, T. C. Hillers. (2024). *BELANJA BERDASARKAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA*. 3, 88–100.
- Miar. (2024). *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Tengah Kalima*. 18(1), 72–88.
- Muchtar, Darmawati, Ben Saadi, Iswadi, Husein, Ratna, Sari, Khotifah, & Nisa, Fitria Zaitun. (2024). *Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dan Pertanggungjawaban Dana Desa*. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 106–113. <https://doi.org/10.59395/altifani.v4i2.509>
- Nuba, Natalia Reinandi, Banda, Falentina Lucia, Soleiman, Iriany Dewi, Akuntansi, Program Studi, Ekonomi, Fakultas, & Flores, Universitas. (2024). *PENDAHULUAN Pada hakekatnya, dalam mewujudkan terselenggaranya pemerintah yang bersih mensyaratkan adanya penerapan pelaporan keuangan yang berbasis pada prestasi kerja secara riil. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar bertanggungjawab p*. 5(1), 15–26.
- Nurul Aulia Hasan, Mattoasi, Mattoasi, & Monoarfa, Valentina Monoarfa. (2024). *Pengaruh Pengawasan dan Akuntabilitas terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada SKPD di Kabupaten Gorontalo*. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 4056–4072. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1495>
- Reski, Nur Awalia. (2021). *Performance Measurement Using Value For Money Concept in Village Government*. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 4(1), 23–29. <https://doi.org/10.37888/bjra.v4i1.247>
- Stien, Zainab, & Gresik, Trate. (2020). *Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Perangkat Desa*. 241–254.